

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada Bab I. Kesimpulan-kesimpulan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Prakondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Profesional Keahlian Teknik secara umum masuk dalam kategori cukup. Kalau dilihat terhadap masing-masing variabel dan aspek-aspeknya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
  - a. Komunikasi kebijakan masuk dalam kategori cukup memadai. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik telah dikomunikasi secara kontinu melalui media transmisi yang tersedia kepada perguruan tinggi mitra, Balai-balai, staf profesional, karyasiswa, tenaga pengajar praktisi, dan instansi pengutus. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan komunikasi tersebut belum efektif menghasilkan persepsi dan komitmen yang sama dari para mitra kerja dalam mengakomodasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik. Hal ini disebabkan oleh 1) pesan yang disampaikan kurang akomodatif terhadap umpan balik dari pelaksana pendidikan seperti PTN dan PTS mitra dan balai-balai. Isi pesannya lebih ke substansi rutin, sehingga pesan yang disampaikan ada kecenderungan tidak berkembang dari waktu ke waktu; 2) media transmisi komunikasi seperti *e-mail system*, dan sistem informasi lainnya sudah tersedia dengan baik,

namun belum dimanfaatkan secara optimal, karena belum terbentuknya kultur kerja dengan memanfaatkan *website*, dan *e-mail system*; 3) penerima informasi kebijakan sangat heterogen, dan diindikasikan masing-masing penerima informasi kebijakan tersebut mempunyai visi dan misi sendiri, sehingga kebijakan yang disampaikan diakomodasikan sesuai dengan visi komunikannya.

- b. Sumber daya untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk kategori cukup. Namun, dari analisis terhadap beberapa aspek sumber daya terungkap bahwa; 1) secara umum kompetensi sumber daya pengelola masuk kategori cukup; 2) tenaga pengajar praktisi belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi, dan perannya, dalam memberikan pembelajaran kepada karyasiswa, sehingga masuk dalam kategori cukup; 3) sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium dan ruang kelas belum telah disediakan dengan sangat baik, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga masuk kategori cukup; 4) dana operasi dan pemeliharaan aset yang dimiliki tidak memadai dan masuk kategori cukup; dan 5) sistem informasi sudah tersedia dengan baik, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga masuk kategori cukup. Hal ini disebabkan oleh: 1) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengelola belum berjalan dengan baik; 2) pembinaan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran belum didukung oleh sistem penerimaan tenaga pengajar yang memadai; 3) belum tersedianya suatu regulasi yang dapat mendorong pemanfaatan aset secara optimal.

- c. Disposisi pelaksana kebijakan dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk kategori cukup atau mendukung atau mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan pimpinan. Namun, dari analisis terhadap aspek-aspek disposisi terungkap bahwa: 1) kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan masuk kategori baik; 2) komitmen terhadap kemajuan organisasi masuk kategori cukup; 3) disiplin dalam melaksanakan tugas masuk kategori cukup, dan 4) motivasi belum secara proaktif melaksanakan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurang terlibatnya pelaksana kebijakan dalam perumusan operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Struktur birokrasi untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk dalam kategori cukup. Dari analisis aspek struktur birokrasi memperlihatkan bahwa: 1) struktur organisasi masuk kategori baik; 2) SOP untuk setiap fungsi organisasi masuk kategori cukup, atau SOP untuk fungsi-fungsi esensial organisasi dan manajemen seperti sistem monitoring dan evaluasi belum tersedia; 2) koordinasi vertikal antara pusat dan balai belum berjalan dengan baik, sehingga masuk kategori cukup; 3) koordinasi horizontal masuk kategori cukup, yaitu koordinasi antar balai di lingkungan Dep. Kimpraswil dan Pemerintah Daerah belum berjalan dengan baik, sehingga pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh Dep. Kimpraswil dan Dinas-dinas Kimpraswil di daerah belum terwujud.

2. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk kategori cukup. Dari analisis aspek-aspek implementasi kebijakan terungkap sebagai berikut.
  - a. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik secara umum masuk kategori cukup. Manajemen penyelenggaraan pendidikan melalui kemitraan dan *tailor-made regional* dan *provincial* belum didukung oleh analisis kebutuhan pendidikan profesional keahlian teknik baik kuantitas maupun kompetensinya di setiap wilayah. Sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan secara efektif, dan indikator mutu proses pendidikan belum tersedia. Sehingga, jajaran pimpinan dan staf Pusdiktek mempunyai kesulitan dalam mengukur kualitas proses penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mitra. Di sisi lain, perguruan tinggi mitra juga tidak mempunyai acuan yang baku dalam melayani pesanan pelaksanaan pendidikan dari Pusdiktek, Dep. Kimpraswil. Selain itu, tim pengendali yang dibentuk oleh Dep. Kimpraswil yang melibatkan jajaran pimpinan Dep. Kimpraswil dan PTN dan PTS mitra tidak berjalan..
  - b. Pembiayaan pendidikan secara umum masuk dalam kategori cukup. Dari analisis subaspek atau dimensi menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan bantuan penuh baik Magister, D4, D3, telah berjalan sangat baik. Namun, pelaksanaan kebijakan pembiayaan untuk pola fasilitasi dan pola swadana tidak berjalan dengan baik.
  - c. Pengembangan dan pembinaan kurikulum secara umum masuk dalam kategori baik. Analisis subaspek atau dimensi memperlihatkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kompetensi program magister D4, dan

- D3, telah melibatkan semua *stakeholders*, tetapi pemantauan dan evaluasi kurikulum belum berjalan dengan baik.
- d. Pengembangan dan pembinaan teknologi pembelajaran secara umum masuk kategori cukup. Analisis data terhadap aspek-aspek pengembangan dan pembinaan teknologi pembelajaran terungkap hasil pelatihan TOT belum dimanfaatkan secara optimal.
  - e. Sistem seleksi secara umum masuk kategori baik. Analisis terhadap aspek-aspek sistem seleksi memperlihatkan: 1) sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik; 2) penyebaran lokasi pelaksanaan seleksi telah meningkatkan jumlah peserta tes; dan 3) materi seleksi yang dikembangkan sudah baik. Namun, pelaksanaan tes belum diorganisasikan dengan baik, dan sistem penetapan kelulusan dipersepsikan kurang transparan.
  - f. Pengembangan dan pembinaan bimbingan dan konseling secara umum masuk kategori cukup. Dari analisis terhadap aspek-aspeknya memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan bimbingan perwalian, SSS dan CPD dirasakan sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar karyasiswa. Namun demikian, kegiatan perwalian dan integrasi substansi bimbingan dan konseling dalam metode pembelajaran belum berjalan.
3. Secara bersama-sama atau gabungan, yaitu komunikasi kebijakan, penyediaan dan optimalisasi sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur serta prosedur pelaksanaan kebijakan mempengaruhi secara signifikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik. Besarnya pengaruh gabungan tersebut yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini sebesar

36,9%, sedangkan pengaruh oleh variabel lain yang tidak bisa dijelaskan dalam penelitian ini sebesar 63,1%.

- a. Komunikasi kebijakan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik sebesar 11,04%.
  - b. Penyediaan sumber daya yang memadai dan pemanfaatan sumber daya secara optimal mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik sebesar 32%.
  - c. Sikap pelaksana yang mendukung dan proaktif mempengaruhi secara signifikan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik sebesar 24,2%.
  - d. Struktur birokrasi yang memadai mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik sebesar 10,7%.
4. Mutu lulusan program pendidikan D3, D4, dan magister, diukur dari IPK masuk kategori baik, dan kalau diukur berdasarkan kinerja memperlihatkan meningkat kompetensinya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada lulusan tersebut. Namun, peningkatan kinerja lulusan tersebut bervariasi: program D3 dan D4 masuk kategori baik, dan lulusan program magister masuk kategori cukup. Aspek kompetensi lulusan program D3 yang belum meningkat, yaitu komitmen, dan penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diperolehnya. Aspek kompetensi lulusan program D4 yang masih rendah, yaitu kompetensi manajerial dan komitmen. Adapun, lulusan program magister aspek yang masih rendah peningkatan kinerjanya, yaitu aspek

keteknikan, manajerial, dan penempatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Secara kuantitas program yang dicapai belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan, atau program D3 baru dicapai 12,22 %, D3 baru tercapai 26,6%, dan magister dicapai 50%.

5. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap kualitas lulusan dan kinerja lulusan program D3, D4, dan magister.
6. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa variabel-variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun demikian, hasil penelitian menemukan juga bahwa masih banyak variabel lain yang memengaruhi implementasi kebijakan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara teoritis hasil penelitian ini memperkuat model yang dikembangkan oleh Edward, dengan hipotesis ada tambahan variabel lain yang dianggap signifikan, seperti proses perumusan dan penetapan kebijakan, kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, dan kepemimpinan.
7. Berdasarkan temuan tersebut dapat dijelaskan secara teoretik bahwa memahami implementasi kebijakan tidak bisa meneliti hanya aspek kinerja dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya, tetapi harus melihat secara komprehensif mulai dari perumusan dan penetapan, implementasi, keluaran dan *outcome*. Karena implementasi merupakan bagian dari siklus proses kebijakan, maka untuk memahami keberhasilan dan kegagalan implementasi harus menempatkan implementasi dalam siklus kebijakan tersebut.



8. Hasil penelitian juga menghasilkan usulan model hipotetik untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik, yang telah mempertimbangkan kebutuhan lokal Pusdiktek, Dep. Kimpraswil.

## **B. IMPLIKASI**

Implikasi dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut.

### **1. Implikasi Makro**

Implikasi makro bagi perumus dan penetap kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik sebagai berikut.

- a. Pimpinan unit eselon I yang membawahkan Pusdiktek dalam berbagai kesempatan perlu mensosialisasikan pada Ditjen-ditjen terkait di lingkungan Dep. Kimpraswil tentang kompetensi Pusdiktek dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik.
- b. Ditjen-Ditjen terkait perlu memberikan masukan dalam pengembangan program penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik jenjang D3, D4, dan magister.
- c. Keberlanjutan pembiayaan pendidikan keahlian teknik sangat terkait dengan berbagai kebijakan keuangan negara. Untuk keberlanjutan pembiayaan pendidikan, unit eselon I yang membawahkan Pusdiktek perlu membantu mempercepat proses dikeluarkannya regulasi pembiayaan pendidikan pola swadana. Sehingga aset yang nganggur (*idle*) dapat dimanfaatkan secara optimal dan partisipasi pembiayaan dari instansi pengutus dapat ditingkatkan.
- e. Merumuskan reformasi tugas dan fungsi Pusdiktek agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan, yaitu menghasilkan lulusan



yang berkualitas, meningkatkan pemerataan dan efisiensi, serta memberdayakan aset yang dimiliki..

## 2. Implikasi Mikro

- a. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik telah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipersepsikan sama oleh semua pelaksana kebijakan. Pusdiktek dan jajarannya harus meningkatkan kualitas pesan yang disampaikan kepada perguruan tinggi mitra. Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdiktek, pesan yang perlu ditingkatkan kualitasnya, yaitu peta kebutuhan pendidikan profesional keahlian teknik, baik secara kuantitas dan kompetensi setiap jenjang pendidikan secara nasional dan regional; sistem monitoring dan evaluasi beserta instrument-instrumennya; kebijakan operasional pendidikan profesional keahlian teknik. Selain itu, Pusdiktek perlu memformulasikan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan kepada semua komponen pelaksana kebijakan. Adapun, balai-balai dan perguruan tinggi mitra harus secara proaktif memberikan umpan balik untuk penyempurnaan substansi pesan yang disampaikan oleh Pusdiktek.
- b. Sumber daya yang disediakan perlu perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan yang baik, sehingga mendukung penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik yang efektif dan efisien. Pusdiktek dan jajarannya harus berupaya meyakinkan pimpinan Dep. Kimpraswil untuk melakukan reformasi kebijakan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

- c. Disposisi dan sikap pelaksana kebijakan atau manajemen dan staf Pusdiktek mempunyai keinginan yang baik untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, agar sikap pelaksana tersebut terpelihara atau meningkat perlu dukungan sistem pengembangan dan penempatan pegawai yang baik. Jajaran Pimpinan Pusdiktek perlu menciptakan suatu iklim yang kondusif agar pelaksana kebijakan terlibat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan. Staf operasional perlu secara proaktif ikut serta dalam memberikan masukan operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik.
- d. Struktur birokrasi Pusdiktek yang ada sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada penataan sistem dan prosedur kerja, sehingga koordinasi antar unit internal dan eksternal dapat ditingkatkan. Pusdiktek perlu menyusun SOP setiap fungsi organisasi, sehingga dapat mengeliminasi fragmentasi yang terjadi..
- e. Manajemen penyelenggaraan pendidikan dengan pola kemitraan perlu memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Balai-balai. Adapun manajemen penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik perlu dukungan lintas instansi dalam memberdayakan dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh *stakeholders*. Selanjutnya, manajemen penyelenggaraan pendidikan dengan pola reguler atau titipan perlu mulai dijalankan.
- f. Pemanfaatan hasil pelatihan teknologi pembelajaran perlu didukung oleh sistem rekrutmen tenaga pengajar, sehingga PTN mitra atau balai-balai mempunyai acuan dalam menyeleksi tenaga pengajar praktisi yang berminat menjadi tenaga pengajar pada pendidikan keahlian teknik.

- g. Penyelenggaraan sistem seleksi untuk menjaring calon peserta didik mempunyai sasaran tidak hanya untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan efisiensi biaya bagi calon peserta didik, juga meningkatkan kualitas calon peserta didik. Konsep pengembangan materi tes dan sistem penetapan kelulusan yang diterapkan oleh Pusdiktek, perlu dipahami oleh PTN dan PTS mitra. Pelaksanaan tes atau seleksi perlu ada kerja sama yang baik antara Pusdiktek, unit pelaksana tes yang ditunjuk, dan penyedia tempat pelaksanaan tes. Sehingga, pelaksanaan tes dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- h. Kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling dirasakan sangat bermanfaat oleh semua pihak. Dengan demikian, Pusdiktek dan jajarannya terutama unit fungsional bimbingan dan konseling perlu secara terus menerus meningkatkan ekstensitas layanannya secara berkelanjutan agar kinerja yang dicapai saat ini dapat ditingkatkan lebih baik.
- i. Pusdiktek dan jajarannya serta PTN dan PTS mitra meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang terkait dengan fokus materi yang disampaikan ke karyasiswa, pelibatan tenaga praktisi yang kompeten, dan penyediaan bahan ajar yang dibutuhkan di lapangan. Adapun, instansi pengutus perlu menempatkan lulusan pendidikan keahlian teknik sesuai dengan kompetensi yang diraihinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

## 2. Implikasi Teoritis

Disadari bahwa hasil penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi metodologi maupun pengkajian secara mendalam tentang hubungan antar variabel penelitian, namun secara umum dapat memberikan implikasi teoretik berkenaan dengan manajemen dan pengorganisasian dan kaitannya dengan mutu dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Pertama, studi lebih lanjut yang berkaitan dengan aplikasi dan pengembangan model proses implementasi kebijakan harus dimulai dengan meneliti kembali proses penetapan kebijakan (*decision-making process*), serta tujuan dan sasaran kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, meneliti bagaimana pimpinan penyelenggara pendidikan menjabarkan kebijakan, tujuan, serta sasaran ke dalam strategi dan kebijakan operasional, serta meneliti bagaimana kebijakan-kebijakan operasional tersebut dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan, sumber daya disediakan dan dimanfaatkan, sistem dan mekanisme kerja dibangun, dan pelaksana langsung dibina dan dikembangkan kompetensinya. Berikutnya, meneliti bagaimana produktivitas organisasi penyelenggara pendidikan, dengan meneliti lebih lanjut kuantitas lulusan yang dihasilkan, mutu keluaran berupa kompetensi keteknikan, manajerial, sikap, dan keterampilan, relevansi mutu keluaran dengan kebutuhan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kesemuanya itu dalam konteks administrasi pendidikan studi kebijakan, yaitu perumusan dan penetapan, pelaksanaan, serta keluaran dan *outcome*.

Implikasi teoretik yang lebih jauh yaitu, dimana letak keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan berada?, apakah pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan, atau pada proses implementasinya itu sendiri?.

- a. Kedua, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel dependen, masih terbatas sifatnya. Dengan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain menyangkut metodologi dan pengkajian hubungan antar variabel penelitian. Sehingga, perlu ada penelitian lebih lanjut yang mendalam baik terhadap variabel yang telah diteliti maupun variabel penting lainnya.

### C. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas maka rekomendasi meliputi sebagai berikut.

#### 1. Rekomendasi Praktis Jangka Pendek

Pertama, mempertahankan tugas dan fungsi Pusdiktek seperti saat ini, tetapi melakukan revitalisasi tugas dan fungsinya atau melakukan penataan kembali sistem dan pengaturan sumber daya internal, yaitu a) penyusunan pengaturan mekanisme kerja manajemen penyelenggaraan pendidikan kemitraan, *tailor-made* dan reguler dan titipan; b) penyusunan peta kebutuhan pendidikan profesional keahlian teknik yang komprehensif, yang menggambarkan secara kualitas kompetensi yang dibutuhkan dan secara kuantitas jumlah yang dibutuhkan pada setiap jenjang kompetensi di setiap wilayah sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan ekonominya; c) penataan sistem monitoring dan evaluasi, yang memuat mekanisme kerja, instrumen, indikator mutu, sumber daya pendukung, revitalisasi fungsi tim pengendali, dan pembentukan kelembagaannya; d) peningkatan komunikasi kebijakan pada internal Dep. Kimpraswil, untuk meningkatkan eksistensi kompetensi Pusdiktek sehingga dihasilkan *trust* dan *commitment* dari internal Dep. Kimpraswil; e) peningkatan

kualitas informasi yang disampaikan kepada PTN mitra; f) pengaturan sistem seleksi yang lebih efektif melalui peningkatan keterlibatan PTN dan PTS mitra dalam menetapkan kelulusan calon peserta didik, dan penetapan sistem pengolahan administrasi seleksi yang dipahami bersama antara pusdiktek dan pelaksana seleksi, sehingga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan; dan g) penataan sistem pengembangan dan pembinaan bimbingan dan konseling, yang lebih menekankan pada perwalian yang profesional, dan integrasi konsep bimbingan dan konseling dengan teknologi pembelajaran; h) pengaturan sistem penerimaan tenaga pengajar praktisi. Kebijakan ini lebih ditekankan pada meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang ada. Peningkatan kuantitas pemerataan pendidikan secara menyeluruh di semua wilayah akan sulit dicapai dengan kebijakan;

Kedua, adanya perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan, yaitu a) kebijakan penyelenggaraan pendidikan dengan pembiayaan secara swadana; b) diversifikasi pembiayaan pendidikan untuk program D3, D4, dan magister. Program D3, dan D4 bantuan penuh, dan program magister "*cost sharing*" antara pemerintah pusat dan instansi pengutus.

## 2. Rekomendasi Praktis Jangka Menengah

Pertama, perlu redefinisi tugas dan fungsi Pusdiktek, yaitu dengan memperluas tugas dan fungsi Pusdiktek yang ada sekarang. Tugas dan fungsi Pusdiktek yang semula sebagai penyelenggara pendidikan profesional keahlian teknik bekerjasama dengan PTN dan PTS, diperluas tugas dan fungsinya sebagai pemberdaya, fasilitator, dan penyelenggara pendidikan keahlian profesional keahlian teknik tertentu. Tugas dan fungsi Pusdiktek lebih ditekankan pada fungsi sebagai pemerintah pusat, yaitu sebagai pemberdaya dan fasilitator bagi pemerintah daerah atau

propinsi yang mampu dalam menyelenggarakan pendidikan profesional keahlian teknik. Selanjutnya, Pusdiktek menyelenggarakan pendidikan terbatas pada pendidikan yang kompetensinya digunakan secara nasional, seperti pendidikan magister. Adapun pendidikan D3 dan D4 diselenggarakan oleh pemerintah propinsi bekerjasama dengan PTN setempat. Tugas Pusdiktek lebih kepada pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.

Kedua, restrukturisasi kelembagaan Pusdiktek, dan Balai, meliputi: 1) restrukturisasi kelembagaan yang ada di Pusat, dan balai-balainya, termasuk relokasi penempatan balai di tempat yang strategis; 2). penataan mekanisme kerja dan pengaturan sumber daya yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru, seperti penataan mekanisme kerja sama penyelenggaraan pendidikan antara Pusdiktek dengan PTN mitra, Pusdiktek dengan pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, serta asosiasi profesi.

Ketiga, reformasi kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan, meliputi 1) reformasi kebijakan dan strategi operasional meliputi pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota; 2) pembiayaan pendidikan dengan pola swadana; 3) sistem seleksi; 4) sistem pembinaan dan penerimaan tenaga pengajar praktisi; 5) pengembangan dan pembinaan kurikulum dan teknologi pembelajaran; 6) penajaman pembinaan dan pengembangan sistem bimbingan dan konseling. Dengan reformasi Pusdiktek tersebut, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai kebutuhan lapangan, efisien, dan meningkatkan pemerataan di semua wilayah.



### 3. Rekomendasi Teoreritis

Pembahasan penelitian yang mengacu kepada perkembangan teori dan model studi implementasi kebijakan, menemukan bahwa belum optimalnya pencapaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, diduga kuat tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen dan pengorganisasian implementasi kebijakan, tetapi terkait dengan kejelasan tujuan dan sarannya. Kejelasan tujuan dan sasaran ini terkait dengan proses penetapan kebijakan (*decision-making process*) penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik yang cenderung elitis.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut rekomendasi teoritis untuk studi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, studi lebih lanjut tentang implementasi kebijakan harus meneliti tiga variabel penting yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu proses penetapan kebijakan (*decision-making process*), serta kejelasan tujuan dan sarannya, proses dan mekanisme pelaksanaan kebijakan, dan meneliti hasil pelaksanaan kebijakan.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel dependen, masih terbatas, padahal variabel lain yang tidak diteliti masih banyak dari variabel yang diteliti. Selain itu, disadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan metodologi, dan penguasaan substansinya. Sehingga, perlu kiranya membutuhkan penelitian lebih lanjut secara mendalam, yaitu:

- a. meneliti prakondisi implementasi kebijakan dengan menambahkan variabel kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, serta kepemimpinan, sebagai variabel

- dependen, dan membandingkan hasil-hasil penelitian tersebut dengan penyelenggara pendidikan sejenis.
- b. meneliti lebih lanjut implementasi kebijakan sebagai variabel dependen dengan keluaran dan kinerja lulusan sebagai variabel independen, yang dalam penelitian ini dengan segala keterbatasan kurang dikaji secara mendalam.
  - c. meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara keluaran dan kinerja lulusan program magister, yang dalam penelitian ini ditemukan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif lulusan magister masuk kategori baik bahkan nyaris sangat baik, namun kerjanya masuk kategori cukup.

Selain rekomendasi teoretik yang berkaitan dengan penelitian implementasi kebijakan lebih lanjut, berikut ini beberapa saran lain berkaitan dengan implementasi kebijakan, sebagai berikut.

Pertama, dalam melaksanakan atau mengaplikasikan model implementasi kebijakan perlu memperhatikan variabilitas antar daerah dan antar perguruan tinggi baik institut dan universitas maupun politeknik terutama sumber daya yang perlu dikembangkan pada daerah tersebut, dan visi dan misi dari masing-masing perguruan tinggi tersebut.

Kedua, ujung tombak pelaksanaan kebijakan pada akhirnya pada sumber daya manusianya, sehingga pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai awal yang strategis dalam mempersiapkan prakondisi implementasi kebijakan. Pembinaan dan pengembangan kompetensi bagi staf pengelola pendidikan, dan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi yang baik sangat bermanfaat dalam mendorong pelaksanaan kebijakan secara optimal.